

**PENGARUH PENDAPATAN PAJAK HIBURAN TERHADAP
PENINGKATAN PAD PADA BADAN PENGELOLA PAJAK
DAN RETRIBUSI DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG
TAHUN 2015-2019 MENURUT PERSPEKTIF
EKONOMI ISLAM**

Skripsi

**Ditujukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi
Syarat-Syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana Akuntansi
(S.Akun).**

Oleh:

**Nama : Efa Yulinda
NPM : 1751030030
Prodi : Akuntansi Syariah**



**PROGRAM STUDI AKUNTANSI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1442H / 2021M**

**PENGARUH PENDAPATAN PAJAK HIBURAN TERHADAP
PENINGKATAN PAD PADA BADAN PENGELOLA PAJAK
DAN RETRIBUSI DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG
TAHUN 2015-2019 MENURUT PERSPEKTIF
EKONOMI ISLAM**

Skripsi

**Diajukan untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi
Syarat-Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi
(S.Akun)**

**Oleh
EFA YULINDA
NPM.1751030030**

Jurusan : Akuntansi Syari'ah

Pembimbing I : H. Supaijo, S.H., M.H.

Pembimbing II : Yulistia Devi, M.S.Ak.

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1442H / 2021M**

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Penulis merasa bahwa judul skripsi ini perlu dijelaskan karena untuk menghindari kesalahpahaman. Hal ini dilakukan sebagai langkah awal untuk memahami judul penelitian. Adapun uraian pengertian beberapa istilah yang terdapat dalam judul proposal ini yaitu, sebagai berikut:

1. Pengaruh merupakan suatu akibat dari asosiatif yang mencari pertautan nilai antara satu variabel dengan variabel lainnya.¹
2. Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan. Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pajak Hiburan dijelaskan dalam pasal 42 sampai 46.²
3. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber pendapatan daerah yang secara bebas dapat digunakan oleh masing-masing daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan daerah. Tapi pada kenyataannya kontribusi PAD terhadap pendapatan belanja daerah masih kecil. Selama ini dominasi sumbangan pemerintah pusat kepada daerah masih besar.³

¹ Sugiyono, *Penelitian administrative* (Bandung: Alfabeta, 2001), 7.

² *Ibid*, 54.

³ Theo Rudolf Waney, Jenny Morasa, "Evaluasi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Manado".⁸⁴.

4. Perspektif merupakan *points of view-eyeglass* atau cara pandang yang membantu kita dalam mempresepsi realitas.⁴
5. Ekonomi islam ialah ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi masyarakat yang diilhami oleh nilai-nilai islam dan bertujuan untuk masalah umat islam, kemudian berprinsip pada ayat dan hadist.⁵

Berdasarkan penjelasan dan batasan pengertian kalimat diatas, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa "Pengaruh Pendapatan Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandar Lampung Menurut Perspektif Ekonimi Islam" Adalah seberapa besar kontribusi pemungutan Pajak Hiburan atas realisasi Pendapatan Asli Daerah Kota Bandar Lampung.

B. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara kesatuan yang menganut asas otonomi daerah. Indonesia sebagai Negara yang memiliki kepulauan yang luas, dalam penyelenggaraan pemerintahannya Indonesia dibagi atas daerah-daerah dan setiap daerah tersebut mempunyai hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban daerah merupakan wewenang daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang undangan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.

Pemerintah daerah membutuhkan sumber penerimaan untuk menjalankan urusan pemerintah yang menjadi kewenangannya. Oleh karena itu, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, pemerintah daerah

⁴ Departemen Pendidikan Nasional, *kamus besar bahasa Indonesia*, Cetakan Empat PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta 2011, 58.

⁵ Mustafa Edwin Nauton, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, (Jakarta:Kencana, 2007), 16.

diberi keleluasan untuk mengelola dan memanfaatkan sumber penerimaan daerah. Dengan keberagaman kondisi di masing-masing daerah, pemerintah daerah dituntut untuk dapat memanfaatkan sumber penerimaan daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki sehingga dapat mengembangkan potensi disetiap daerah masing-masing. Pemerintah daerah diharap dapat mengalokasikan pendapatan sesuai dengan apa yang diharapkan masyarakat agar masyarakat mendapatkan pelayanan yang baik dan agar masyarakat dapat sejahtera.⁶

Bandar Lampung merupakan daerah otonomi yang juga menerapkan kosep desentralisasi sebagaimana daerah-daerah di Indonesia yang lain. Sehingga kota Bandar Lampung juga diberikan hak dan kewajiban untuk mengatur sendiri pendapatan daerahnya guna untuk mensejahterakan masyarakat kota Bandar Lampung itu sendiri. Untuk menjalankan hak dan kewajiban, pemerintah daerah memerlukan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Meningkatnya kota Bandar Lampung sebagai kota yang memiliki banyak tempat wisata, mendorong pemerintah untuk membangun berbagai tempat hiburan yang tersebar diseluruh kota Bandar Lampung. Dengan pesatnya pembangunan di Kota Bandar Lampung, maka akan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah utamanya melalui Pajak Daerah berupa Pajak Hiburan.⁷

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan penerimaan daerah yang bersumber dari dalam daerah sendiri, yang pemungutannya berdasarkan perundang-undangan yang berlaku. Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

⁶Undang-Undang Republik Indonesia Nimor 32 Tahun 2004, *Tentang Pemerintahan Daerah Presiden Republik Indonesia*

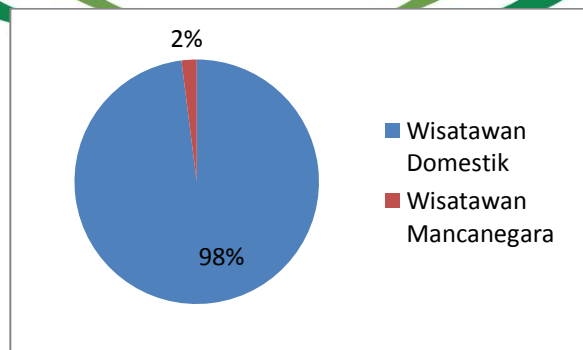
⁷Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009, *Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah*.

Tabel 1
Data Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Kota Bandar Lampung Tahun 2015-2019

Tahun	Target	Realisasi	Persentase
2015	2.325.073.693.279	1.843.540.674.593	79,29%
2016	2.618.785.917.617	2.057.086.652.010	78,55%
2017	2.677.907.545.632	2.061.420.040.685	76,98%
2018	2.593.521.842.430	2.183.555.433.779	84,19%
2019	2.651.633.344.300	2.298.132.770.769	86,67%

Sumber : BPPRD

Dengan data yang sudah ada, dapat dilihat bahwa realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak mencapai target yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah Kota Bandar Lampung, namun terus mengalami peningkatan antara tahun 2015-2019.



Sumber: Dinas pariwisata Kota Bandar Lampung

Gambar 1
Jumlah wisatawan Kota Bandar Lampung 2019

Pada diagram diatas terlihat bahwa akhir tahun 2019 wisatawan Domestik Bandar Lampung mencapai 98%

kemuadian untuk wisatawan mancanegara sebesar 2%. Menurut Dinas Pariwisata Kota Bandar Lampung, pada akhir tahun 2019 Wisatawan yang berkunjung ke Bandar Lampung yaitu sebanyak 1.086.711 orang.

Salah satu pendapatan daerah bersumber dari pajak daerah yaitu Pajak Hiburan. Menurut Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 12 tahun 2017 Pasal 18 Ayat 1 Pajak Hiburan adalah jasa penyelenggara hiburan dengan dipungut bayaran, yaitu tontonan film, pagelaran kesenian, musik, tari (modern) dan/atau busana. Kontes kecantikan, binaraga dan sejenisnya, klub malam, karaoke, dan sejenisnya, sirkus, akrobat, dan sulap. Permainan, bilyar, bowling, pacuan kuda, kendaraan bermotor dan permainan ketangkasan, panti pijat, refleksi, mandi uap/SPA dan pusat kebugaran dan sejenisnya. Tarifnya beragam diatur dalam pasal 21.⁸

Pada tabel diatas menunjukkan pesatnya kenaikan pendapatan pajak hiburan karaoke dari tahun ketahun, namun pada tahun 2018 terjadi sedikit penurunan. Dapat pula dilihat bahwa objek pajak karaoke tidak capai target. Pada tahun 2018 realisasi sudah lebih caapai target, namun memang target tahun 2018 tidak sebesar target padatahun-tahun sebelum dan sesudahnya.



Tabel 2
Target dan Realisasi Pajak Hiburan Kota Bandar Lampung
Tahun 2015-2019

Tahun	Target	Realisasi	Persentasi
2015	8.500.000.000	8.569.424.087	100,82%
2016	9.000.000.000	10.569.155.384	117,44%
2017	15.000.000.000	15.796.479.831	105,31%
2018	21.000.000.000	23.040.584.556	109,72%
2019	40.000.000.000	30.155.659.314	75,39%

Sumber : BPPRD

⁸Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017, *Tentang Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung*.

Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa persentase penerimaan pajak hiburan sangat fluktuatif, pada tahun 2015 persentase pendapatannya sebesar 100,82%, kemudian pada tahun 2016 naik menjadi 117,44%, namun pada tahun 2017 turun sebesar 105,31%, kenaikan terjadi lagi di tahun 2019 109,72% dan turun lagi sebesar 75,39% pada tahun terakhir yaitu tahun 2019. Hal ini tentunya akan berdampak terhadap penerimaan pendapatan Asli daerah Kota Bandar Lampung.

Tabel 3
Jumlah Usaha Hiburan Kota Bandar Lampung

No	Pajak Hiburan	Jumlah Usaha
1	Tontonan Film	7
2	Karaoke	33
3	Permianan Ketangkasan	23
4	Pusat Kebugaran	2
5	Salon/SPA	9
6	Panti Pijat/Refleksi	10
7	Permainan Biliar	5

Sumber : BPPRD

Di Kota Bandar Lampung banyak muncul usaha-usaha hiburan umum dan rekreasi seperti usaha permainan ketangkasan. Dalam pengedarannya terdapat perusahaan besar yang menyediakan permainan ketangkasan di mall besar kota Bandar Lampung, yaitu PT. Matahari Graha Fantasi atau dikenal dengan nama Timezone yang bergerak dalam dunia bisnis entertainment yang pola perkembangan dan inovatif menciptakan pengalaman bermain yang menyenangkan sekaligus mudah. Selain Timezone, banyak juga hiburan permainan ketangkasan yang tersebar di Kota Bandar Lampung, seperti Zone 2000 (PT. Indonesia Fantasi Sentosa), Wahana

Boomerang Lembah Hijau, Jurassic Land, Kiddy Fun, Game Center Empirez_TBS dan masih banyak lagi.

Tabel 4
Realisasi Pajak Permainan Ketangkasan Kota Bandar
Lampung Tahun 2015-2019

Tahun	Target	Realisasi	Persentase
2015	1.326.981.000	1.201.965.316	90,58%
2016	1.289.880.000	1.365.455.773	105,86%
2017	1.427.680.000	1.538.799.094	107,78%
2018	3.264.480.000	3.400.239.470	104,16%
2019	5.505.200.000	4.578.616.308	83,17%

Sumber : BPPRD

Berdasarkan tabel dapat disimpulkan bahwa realisasi pajak hiburan permainan ketangkasan Kota Bandar Lampung mengalami peningkatan dari tahun ketahun, namun dapat dilihat dari presentase pencapaian target pada tahun 2018 mengalami penurunan dari 107,78% ke 104,16% sedangkan di tahun 2019 mengalami penurunan lagi sebesar 83,17%.

Selain industri hiburan permainan ketangkasan, hiburan karaoke juga merupakan aset kas pemerintah daerah Kota Bandar Lampung, yang dalam penarikan pajaknya dikenakan sesuai Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung. Bisnis hiburan karaoke adalah salah satu bisnis hiburan yang cukup menjanjikan di Kota Bandar Lampung sehingga sampai saat ini sudah ada banyak tempat karaoke keluarga dengan pemilik yang berbeda, antara lain Stars On The Rock karaoke, Inul Vista Karaoke, Nav Karaoke, Happy Poly Karaoke, Happy One Karaoke, Lyrics Karaoke, Grand Karaoke dll. Karaoke adalah sebuah jenis hiburan dimana seseorang diiringi dengan musik dan teks lirik yang ditujukan pada sebuah layar. Bisnis Karaoke menjadi salah satu bisnis yang menguntungkan karena dilihat dari ketertarikan konsumen yang saat ini mencari hiburan untuk menghilangkan kejenuhan dari berbagai macam aktifitas rutinnnya.

Tabel 5
Realisasi Pajak Kraoke Kota Bandar Lampung Tahun
2015-2019

Tahun	Target	Realisasi	Persentase
2015	2.503.660.000	2.195.266.993	87,68%
2016	2.662.660.000	2.416.642.527	90,76%
2017	2.882.660.000	2.492.570.123	86,47%
2018	261.000.000	2.468.507.610	945,79%
2019	8.410.500.000	5.113.800.687	60,80%

Sumber : BPPRD

Berdasarkan data yang bersumber dari Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kota Bandar Lampung khususnya data target dan realisasi penerimaan pajak hiburan yaitu pajak Hiburan Permainan Ketangkasan dan Karaoke tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 menunjukkan bahwa kuantitas wajib pajak hiburan yang terus mengalami peningkatan. Berikut data yang diperoleh:

Dalam perspektif ekonomi islam, pajak yang biasa disebut dengan zakat, terdistribusi dengan baik. Untuk persoalan ekonomi, Negara harus menjamin dan memastikan bahwa setiap warga Negara memiliki kesempatan yang sama untuk mengakses dan memanfaatkan sumber daya ekonomi. Dampaknya, setiap anggota masyarakat akan dapat hidup dengan standar kebutuhan minimum, seperti makan, tempat tinggal, kesehatan, ibadah dan pendidikan. Dengan demikian, Negara sebaiknya mengatur pemanfaatan sumber daya ekonomi agar dapat terdistribusi secara merata dan adil sehingga tidak ada satupun bagian anggota masyarakat yang terdzalimi baik oleh Negara maupun sesama anggota masyarakat untuk memperoleh akses terhadap sumber daya ekonomi tersebut.⁹

⁹Nurul Huda dkk, *Keuangan Publik Islam* (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 29.

Berdasarkan hal tersebut, Al-Quran telah menjelaskan pada surat An-Nahl (16) : 90.

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَنِ وَإِيتَايَ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ
الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُم لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴾

Artinya: “*Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.*” (QS An-Nahl [16]: 90)

Menurut (Iftakhur Rizqiyah: 2015) terdapat pengaruh pajak hiburan terhadap pendapatan asli daerah Kota Semarang periode 2009-2013, namun menurut (Suci Wulandari: 2014) tidak terdapat pengaruh Pajak Hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Tanjung Pinang periode 2009-2013. Perbedaan yang terdapat dari beberapa penelitian tersebut adalah bahwa pajak hiburan akan memberikan pengaruh atau tidak terhadap Pendapata Asli Daerah (PAD) hal itu tergantung pada besar kecilnya penerimaan pajak hiburan tersebut di daerah masing-masing, karena setiap daerah pasti memiliki potensi masing-masing yang dapat dijadikan sebagai penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Berdasarkan hasil penelitin terdahulu yang disebutkan sebelumnya, maka peneliti tertarik untuk mengambil permasalahan ini di Kota Bandar Lampung dengan mengambil judul **“PENGARUH PENDAPATAN PAJAK HIBURAN TERHADAP PENINGKATAN PAD PADA BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2015-2019 MENURUT PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM”**

C. Identifikasi dan Batasan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka identifikasi masalah pada penelitian ini yaitu:

- a. Pajak hiburan atas Permainan Ketangkasan dan Karaoke mengalami peningkatan yang cukup signifikan namun terjadi penurunan dibeberapa tahun tertentu.
- b. Pada penelitian terdahulu, pajak hiburan tidak berpengaruh pada peningkatan PAD.

2. Batasan Masalah

Mengingat keterbatasan kemampuan yang dimiliki peneliti, banyaknya permasalahan yang ada serta agar pembahasan masalah tidak meluas maka penulis perlu mempersempit ruang lingkup penelitian ini. Penelitian ini akan di fokuskan batasan masalah, Penelitian ini hanya berfokus pada salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) atas pajak hiburan. Pajak Daerah yang menjadi objek penelitian ini adalah Pajak Hiburan Kota Bandar Lampung pada tahun 2015-2019. Pajak hiburan yg akan diteleiti yaitu pajak atas Permainan Ketangkasan dan Hiburan Karaoke.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka dapat disimpulkan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Apakah Pajak Hiburan atas Permainan Ketangkasan berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bandar Lampung tahun 2015-2019?

2. Apakah Pajak Hiburan atas Karaoke berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bandar Lampung tahun 2015-2019?
3. Apakah Pajak Hiburan atas Permainan Ketangkasan dan Karaoke berpengaruh secara simultan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bandar Lampung tahun 2015-2019?
4. Bagaimana pandangan Ekonomi Islam terhadap Pajak Hiburan sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah Kota Bandar Lampung?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui apakah Pajak atas Permainan Ketangkasan berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bandar Lampung tahun 2015-2019
2. Untuk mengetahui apakah Pajak atas Karaoke berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bandar Lampung tahun 2015-2019
3. Untuk mengetahui apakah Pajak atas Permainan Ketangkasan dan Karaoke berpengaruh secara simultan p Pendapatan Asli Daerah Kota Bandar Lampung tahun 2015-2019
4. Untuk menjelaskan bagaimana pandangan Ekonomi Islam terhadap Pajak Hiburan sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah Kota Bandar Lampung

F. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian adalah kegunaan dari penelitian yang telah dilaksanakan, serta untuk menjelaskan manfaat penelitian yang telah dilakukan peneliti.¹⁰ Adapun manfaat penelitian ini yaitu:

1. Bagi penulis, Penelitian ini merupakan suatu kesempatan bagi peneliti untuk menerapkan pengetahuan teoritis yang diperoleh dari bangku kuliah, serta memperluas wawasan penulis dalam bidang perpajakan khususnya tentang Pengaruh Penerimaan Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandar Lampung Menurut Perspektif Ekonomi Islam.
2. Bagi Pemerintah, diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pemerintah daerah khususnya Badan Pengelola Pajak dan Rtribusi Daerah Kota Bandar Lampung dalam mengambil kebijakan, dalam rangka meningkatkan pemasukan pajak hiburan, secara efektif untuk mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bandar Lampung.
3. Bagi mahasiswa, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi untuk peneliti yang akan datang, khususnya kepada mahasiswa program studi Akuntansi Syariah yang akan melakukan penelitian sejenis mengenai Pengaruh Pemungutan Pajak Hiburan Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Menurut Perspektif Ekonomi Islam.

G. Kajian Penelitian Terdahulu

Sebelum melakukan penelitian ini lebih lanjut, peneliti melakukan penelaahan terhadap karya-karya ilmiah yang

¹⁰Hiriansyah, *Ready For Research (Principle and Practices) Metodologi Penelitian, suau tinjauan konsep dan konstruk* (Jawa Timur: Qiara Media partner, 2019), 55.

berhubungan dengan penelitian yang berjudul “Pengaruh Pemungutan Pajak Hiburan Pada Peningkatan Pendapatan Asli Daerah pada Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Bandar Lampung Periode 2015-2019 Menurut Perspektif Ekonomi Islam”. Tujuan penelaahan ini adalah untuk menghindari kesamaan dalam pembahasan serta untuk mengembangkan karya-karya ilmiah yang berkaitan dengan karya ilmiah ini.

1. Pada penelitian yang berjudul Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Restoran Dan Pajak Hiburan Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tulungagung Periode 2012-2016 oleh Rista Anggraini. Pajak Hiburan tidak berpengaruh terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Kendari.¹¹
2. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Suci Wulandari pada tahun 2014 yang berjudul Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame Dan Pajak Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Tanjung Pinang Periode 2009-2013, menyimpulkan bahwa Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Tidak terdapat pengaruh signifikan Pajak Hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Tanjungpinang periode 2009-2013, Tidak terdapat pengaruh signifikan Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Tanjungpinang periode 2009-2013, Tidak terdapat pengaruh signifikan Pajak Hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Tanjungpinang periode 2009-2013, Tidak terdapat pengaruh signifikan Pajak Reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Tanjungpinang periode 2009-2013, dan Tidak terdapat pengaruh signifikan Pajak parkir terhadap Pendapatan Asli

¹¹Rista Anggraini, ”Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Restoran Dan Pajak Hiburan Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tulungagung Periode 2012-2016”, Artikel Skripsi Universitas Nusantara PGRI Kediri, (2017), <http://simki.unpkediri.ac.id/detail/13.1.02.01.0166>

Daerah Kota Tanjungpinang periode 2009-2013.¹²

3. Menurut penelitian yang berjudul Pengaruh Pemungutan Pajak Hotel Dan Pajak Hiburan Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Medan oleh Nabila Suha Bahmid dkk pada tahun 2018, menyatakan bahwa Ada pengaruh pemungutan Pajak Hiburan terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah dan tidak menemukan adanya pengaruh pemungutan Pajak Hotel terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah.¹³
4. Pada penelitian yang dilakukan oleh Aris Triyono pada tahun 2018 yang berjudul Analisis Pengaruh Kontribusi Pajak Reklame dan Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu, menyimpulkan bahwa Kontribusi pajak reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Indragiri Hulu sangat kurang selama 5 tahun, dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 kontribusinya hanya sebesar 3,15 % dengan rata-rata kontribusi 0,63%. Kontribusi pajak hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Indragiri Hulu persentasenya hanya 0,36% dengan pencapaian rata-rata 0,07%, Pengaruh Pajak Reklame dan pajak Hiburan terhadap Pendapatan asli Daerah (PAD) berdasarkan hasil Hipotesis (H1, H2 dan H3), tidak signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Namun terdapat hubungan yang kuat sebesar 76,6%, sedangkan sisanya sebesar

¹²Suci Wulandari, "Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame Dan Pajak Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Tanjungpinang Periode 2009-2013", Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Maritim Raja Ali Haji, Tanjungpinang, (2014), https://jurnal.umrah.ac.id/wp-content/uploads/gravity_forms/1-ec61c9cb232a03a96d0947c6478e525e/2014/08/Pengaruh-Pajak-Hotel-Pajak-Restoran-Pajak-Hiburan-Pajak-Reklame-dan-Pajak-Parkir-terhadap-PAD-Kota-Tanjungpinang.pdf

¹³ Nabila Suha Bahmid "Pengaruh Pemungutan Pajak Hotel Dan Pajak Hiburan Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Medan, urnal Riset Akuntansi & Bisnis Vol. 18 No. 1, (2018), <http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/akuntan/article/view/2046/2040>

23,4% di pengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.¹⁴

5. Penelitian yang dilakukan oleh Magdalena Silawati Samosir pada tahun 2020 dengan judul penelitian Analisis Pengaruh Kontribusi dan Efektivitas Pajak Hotel, Restoran dan Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sikka, menyatakan bahwa Hasil analisis kontribusi menunjukkan bahwa pajak hotel dan restoran dikategorikan kurang mempunyai kontribusi, sedangkan pajak hiburan dikategorikan relatif tidak mempunyai kontribusi. Hasil analisis Efektivitas menunjukkan bahwa pajak hotel dan restoran Tahun Anggaran 2013-2017 mampu menggambarkan kemampuan Pemda Kabupaten Sikka dalam merealisasikan pajak hotel dan restoran yang direncanakan dibandingkan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Selanjutnya pajak hiburan menunjukkan kondisi yang sebaliknya dimana Pemda Kabupaten Sikka belum mampu dalam merealisasikan pajak hiburan yang direncanakan dibandingkan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah.¹⁵

Peneliti akan membahas Pengaruh Pemungutan Pajak Hiburan Pada Peningkatan Pendapatan Asli Daerah pada Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Bandar Lampung Periode 2015-2019 Menurut Perspektif Ekonomi Islam, Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah penelitian ini akan membahas secara spesifik pajak hiburan

¹⁴ Aris Triyono, “Analisis Pengaruh Kontribusi Pajak Reklame dan Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu”, *Jurnal Manajemen dan Bisnis* p-ISSN 2302-4313 Volume VII, No. 03, (2018), <https://journal.stieindragiri.ac.id/index.php/jmbi/article/view/15/8>

¹⁵ Magdalena Silawati Samosir, “Analisis Pengaruh Kontribusi dan Efektivitas Pajak Hotel, Restoran dan Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sikka”, *Journal of Public Administration and Government*, Volume 2, No. 1, (2020), <https://jurnal.fisip.untad.ac.id/index.php/JPAG/article/view/38/24>

yaitu pajak hiburan atas permainan ketangkasan dan pajak hiburan karaoke, penelitian ini juga dilakukan pada 5 tahun terakhir, yaitu 2015-2019 guna memperoleh hasil yang terupdate. Perbedaan selanjutnya yaitu pada lokasi penelitian, dimana penelitian ini akan dilakukan di Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Bandar Lampung.



H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

Tabel 6
Sitematika Penulisan

BAB I	PENDAHULUAN
	A. Penegasan Judul
	B. Latar Belakang Masalah
	C. Identifikasi dan Batasan Masalah
	D. Rumusan Masalah
	E. Tujuan Penelitian
	F. Manfaat Penelitian
	G. Kajian Penelitian Terdahulu
	H. Sistematika Penulisan
Bab II	LANDASAN TEORI
	A. Teori Pengenaan Pajak
	B. Teori Pembangunan Ekonomi
	C. Pajak
	D. Pendapatan Asli Daerah
	E. Pajak hiburan
	F. Pajak dalam Islam
	G. Kerangka Berfikir
	H. Hipotesis
BAB III	METODE PENELITIAN
	A. Jenis Penelitian
	B. Sifat Penelitian
	C. Jenis dan Sumber Data
	D. Metode Pengumpulan Data
	E. Populasi dan Sampel
	F. Definisi Variabel Operasional
	G. Alat Analisi Data
	H. Metode Analisis
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

	A.Deskripsi Data
	B. Pembahasan
BAB V	PENUTUP
	A.Simpulan
	B. Rekomendasi
	DAFTAR RUJUKAN
	LAMPIRAN



BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah Pajak Hiburan atas Usaha Permainan Ketangkasan dan Usaha Kraoke berpengaruh terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Bandar Lampung, dengan metode analisis regresi linier berganda dan dengan dibantu oleh SPSS Versi 26, penelitian ini menghasilkan kesimpulan yaitu:

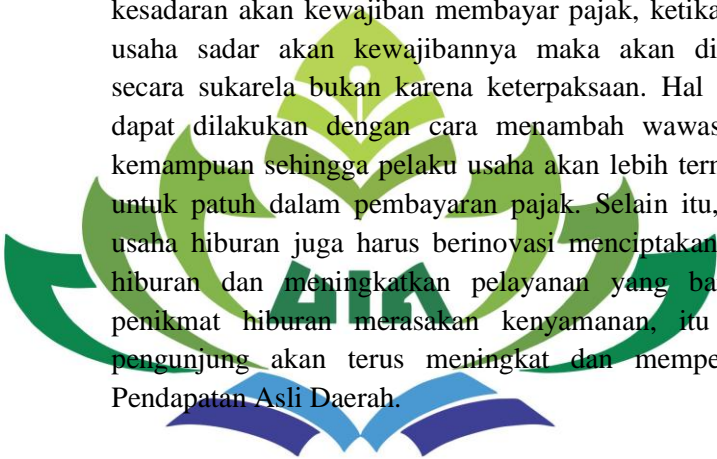
1. Pada Uji Signifikansi Parsial (Uji T) memperoleh hasil bahwa Pajak atas Permainan Ketangkasan berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah selama periode 2015-2019.
2. Pajak Hiburan atas Karaoke berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) selama periode 2015-2019.
3. Pajak Hiburan atas Permainan Ketangkasan dan Pajak Hiburan atas Karaoke berpengaruh secara simultan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).
4. Pandangan Ekonomi Islam terhadap pajak hiburan sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yaitu dari segi pemanfaatannya. Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Bandar Lampung sudah mengalokasikan pendapatan dengan baik untuk pembangunan daerah, juga dalam pemungutannya pemerintah daerah sudah berlaku adil sesuai dengan ajaran Islam, dimana pemungutan pajak bertujuan untuk kemaslahatan agar dapat terhindar dari kemudharatan.

B. Rekomendasi

1. Pemerintah Kota Bandar Lampung harus mampu mengoptimalkan efektifitas pungutan pajak agar terus mampu mencapai target yang telah ditetapkan, pemerintah

bisa melakukan deregulasi persyaratan pembayaran pajak yang lebih sedikit, kemudian meningkatkan lagi literasi pajak terhadap pelaku usaha hiburan dengan cara mengirimkan pesan secara berkala ke bagian administrasi usaha hiburan Kota Bandar Lampung terkait harus patuh dan taat bayar pajak. Pemerintah daerah harus dan wajib memperluas dan membangun akses jalan, terminal, air dan listrik agar memudahkan masyarakat untuk berkunjung ke tempat hiburan.

2. Pelaku usaha hiburan harus patuh dan perlu meningkatkan kesadaran akan kewajiban membayar pajak, ketika pelaku usaha sadar akan kewajibannya maka akan dilakukan secara sukarela bukan karena keterpaksaan. Hal tersebut dapat dilakukan dengan cara menambah wawasan dan kemampuan sehingga pelaku usaha akan lebih termotivasi untuk patuh dalam pembayaran pajak. Selain itu, pelaku usaha hiburan juga harus berinovasi menciptakan tempat hiburan dan meningkatkan pelayanan yang baik agar penikmat hiburan merasakan kenyamanan, itu karena pengunjung akan terus meningkat dan mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah.



DAFTAR RUJUKAN

- Abdul Aziz. 2008 *.Ekonomi Islam Analisis Mikro Dan Makro*, Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Adiwarma A. Karim. 2011. *Ekonomi Mikro Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Ahmad Yani, *Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers. 2018.
- Aries A Djaenuri. 2012. *Hubungan Keuangan Pusat-Daerah, Elemen-elemen Penting Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah*. Bogor: Ghalilia Indonesia.
- Departemen Pendidikan Nasional. 2011.*kamus besar bahasa Indonesia*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Alquran Dan Terjemahnya*.
- Euis Amalia. 2009.*Keadilan Distributif Dalam Ekonomi Islam Penguatan Peran LKM dan UKM di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Gusfahmi. 2007. *Pajak Menurut Syariah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Hariyanto dkk. 2007.*hubungan antara dana alokasi umum, belanja modal, pendapatan asli daerah dan pendapatan per kapita*. Makassar: simposium nasional.
- Hiriansyah.2019. *Ready For Research (Principle and Practices)Metodologi Penelitian, suau tinjauan konsep dan konstruk*.Jawa Timur: Qiara Media partner.
- Iftakhur Rizqiyah.2015. “*Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame Dan Pajak Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Semarang2009 – 2013*” (Semarang: Universitas Dian Nuswantoro), <http://eprints.dinus.ac.id/17677/>
- Ilviana, Safitri. 2009. *Perencanaan Sistem Instalasi Pengolahan Air Limbah*. Jakarta: UI Press.

- Imam Ghazali.2011. *Aplikasi Analnsis Multivariate Dengan Program IBM SPSS*. Semarang : Universitas Diponogoro.Landiyanto, Agustino. 2005. *Kinerja Keuangan dan Strategi Pembangunan Kota di Era Otonomi Daerah*.Kota Surabaya: CURES working paper surabaya.
- Laurentia Sumarni. 2016. *Translition From Theory To Practic*.Yogyakarta: English Language Education Study Program Sanata Dharma University.Mardiasmo. 2011. *Perpajakan*. Yogyakarta : ANDI OFFSET.
- M. Umer Chapra. 2000. *Islam Dan Tantangn Ekonomi, Diterjemahkan Oelh Ikhwan Abidin Basri*, Jakarta: Gema Insani Press
- MUI, *Kriteria Karaoke Keluarga Yang Dapat Di Tolerir Menurut Pandangan Fikih Islam*.
<https://www.muisumut.com/wp-content/uploads/2019/04/KRITERIA-KARAOKE-KELUARGA-YANG-DAPAT-DI-TOLEIR.pdf-2010.pdf>
- MUI, *Permainan Pada Msedia/Mesin Permainan yang Dikelola Anggota Asosiasi Rekssreasi Keluarga Indonesia (ARKI)*.
- Mursal.2015. *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam, Implementasi Prinsip-Prinsip Ekonomi Syariah: Alternatif Mewujudkan Kesejahteraan Berkeadilan, Volume 1 Nomor 1*.
<http://jurnal.unsyiah.ac.id/JPED/article/view/6521>
- Mustafa Edwin Nauton. 2007.*Pengenalan Ekslusif Ekonomi Islam*. Jakarta:Kencana.
- Modul Ekonomertika, *Dasar-Dasar Teori dan Terapan*.
- Nanang Martono. 2010. *Metode Penelitian Kuantitatif, Esisi Revisi ke 2*.Bandung:Raja Grafindo Persada.
- Nurul Huda dkk. 2012. *Keuangan Publik Islam* . Jakarta: Kencana.

- Nurul Huda Et Al, *Ekonomi Makro Islam: Pendekatan Teoritis.*, h. 2.
- Pasal 1 Butir 13 Undang-Undang N0 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara
- Pasal 1 Butir 15 Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah
- Poltak Sinambela Lijan, *Metode Penelitian Kuantitatif*, (Graha Ilmu, Yogyakarta:2014
- Rita Anggraini. 2017. "*Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Restoran Dan Pajak Hiburan Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tulungagung Periode 2012-2016*" (Kediri: Universitas Nusantara PGRI Kediri),
http://simki.unpkediri.ac.id/mahasiswa/file_artikel/2017/8f1fec67cb9d0dff22187abfd465cf6.pdf
- Rohmad, Suprayitno. 2015. *Pengantar Statistik*. Yogyakarta:Kalimedia.
- Theo Rudolf Waney, Jenny Morasa. *Evaluasi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Manado*.
- Rully Indrawan, Poppy Yaniwati. 2014. *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan Campuran*. Bandung : Reflika Aditama.
- Saragih. 2003. *Desentralisasi Fiskal dan Keuangan Daerah Dalam Otonomi*. Jakarta: Ghallia Indonesia.
- Sembiring, Sentosa. 2010. *Pemerintahan Daerah (PEMDA)*. Bandung : Nuansa Aulia.
- Silviana, Safitri. 2009. *perencanaan sistem instalasi pengolahan air limbah*. Jakarta: UI Press
- Sugiyanto. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung : Alfabeta. Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2001. *Penelitian administrative*. Bandung: Alfabeta.
- Suharismo Arikunto. 2006. *Prosedur penelitian suatu pendekatan praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sumadi Suryabrata. *Metodologi Penelitian*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.

- Toar Waraney Lakoy. 2016. *Kontribusi dan pengaruh penerimaan retribusi daerah terhadap pendapatan Asli daerah di Kabupaten Minahasa selatan. jurnal berkala ilmiah efisiensi*.Vol 16 No. 01.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nimor 32 Tahun 2004, Tentang Pemerintahan Daerah Presiden Republik Indonesia
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017, Tentang Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009, Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah.
- Undang-Undang No28 Tahun 2009 *tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Wajib Kepada Daerah diakses apada.*
www.djpk.depkeu.go.id
- Usman, Husnaini dan Setiadi.2003. *Pengantar Statistik*.Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Wahyu Indro Widodo, Bambang Guritno. 2017.*Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Yogyakarta*), *Jurnal Visi Manajemen* Vol 2, No. 2, <http://stiepari.greenfrog-ts.co.id/jurnal/index.php/JVM/article/view/79>
- Wiratna Sujarweni. 2015. *Metedologi Penelitian Bisnis dan Ekonomi*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*.
- Zainuddin Ali, *Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Sinar Garfika, 2009)